



Menyoal Mandeknya “Waste to Energy”

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan sampah di Jakarta dinilai masih berjalan di tempat, sementara anggaran untuk penanganan sampah sudah disediakan guna melakukan terobosan penanganan sampah yang ideal. Salah satu hal yang belum terwujud adalah pengolahan sampah modern dengan konsep *waste to energy*.

Hal ini dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024) siang. Ia mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kebijakan terhadap pengolahan sampah.

“Salah satu hal yang belum terwujud adalah pengolahan sampah modern dengan konsep *waste to energy* (WTE). Padahal, dengan konsep ini, sampah yang tadinya menjadi beban berpeluang untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan perekonomian warga,” kata Nabilah.

Adapun WTE merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi yang dapat digunakan, seperti listrik, panas, dan bahan bakar. WTE merupakan alternatif pembuangan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Selain itu, Nabilah juga mengatakan, seharusnya sampah plastik dapat dijadikan bahan olahan untuk membangun rumah dan jalan raya sebagaimana dilakukan di beberapa daerah lain.

Nabilah menyoroti rencana Pemprov DKI Jakarta menarik retribusi sampah dari masyarakat. Ia menilai pengolahan sampah dengan konsep tersebut masih belum optimal. Untuk itu, ia meminta rencana retribusi sampah ditinjau kembali.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan bakal menarik biaya retribusi sampah mulai 1 Januari 2025. Retribusi pelayanan

kebersihan ini diterapkan dengan prinsip *polluter pays principle*, yakni warga yang menghasilkan sampah akan menanggung biaya pengelolaannya.

Kemudian, sarana penunjang pengolahan sampah juga dikatakan Nabilah masih belum merata di Jakarta. Tempat pembuangan sampah (TPS) masih sering menumpuk karena kekurangan armada. Kemudian, kesejahteraan para pekerja kebersihan di tiap wilayah juga masih perlu diperhatikan.

“Terkait kebijakan mendorong Jakarta sebagai kota global dalam penataan sampah, masih perlu dipertimbangkan sarana prasarana pengangkutan sampah yang lebih humanis, modern, serta ramah lingkungan,” katanya.

Lebih menguntungkan

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak juga berpendapat. Pengolahan sampah dengan konsep WTE yang di-

dukung teknologi ramah lingkungan *intermediate treatment facility* (ITF) bakal menghasilkan keuntungan bila diterapkan di Jakarta dalam jangka panjang.

Keuntungan ini berasal dari penghematan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebesar Rp 534 miliar per tahun dan pendapatan perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang terlibat sebagai pengelola dan operator ITF sebesar Rp 350 miliar per tahun, dengan asumsi kepemilikan saham di ITF 35 persen.

“Pengaktifan ITF lebih menguntungkan ketimbang mempertahankan pengolahan sampah di Bantargebang, Kota Bekasi. Pemprov DKI harus membayar uang bau Rp 500 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah sekitar Rp 2,9 triliun per tahun,” kata Ali.

Meski sudah mengeluarkan biaya besar, masalah sampah di Jakarta tak kunjung terpecah-

kan. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat, sedangkan sampah yang terkelola justru dalam tren menurun.

Adapun berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah di Jakarta meningkat jadi 3,14 juta ton pada 2023 dari tahun sebelumnya 3,11 juta ton. Namun, jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.

Ali mengatakan, sebelumnya, PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) telah menargetkan pembangunan proyek pengolahan sampah ITF Sunter di Jakarta Utara, yang dilakukan paling lambat November 2023 dan mulai berproduksi pada 2025. Namun, pembangunan itu dihentikan karena biayanya dinilai terlalu tinggi.

Meski demikian, kapasitas

pengolahan sampah ITF Sunter sebesar 2.200 ton per hari atau 28,21 persen dari total kapasitas sampah Jakarta di Bantargebang yang sebesar 7.800 ton per hari. Menurut Ali, pengolahan sampah di ITF Sunter secara otomatis mengurangi sampah yang harus dibuang ke Bantargebang.

“Artinya, dengan produksi ITF Sunter, pemda bisa menghemat pengeluaran 28,21 persen atau Rp 959 miliar per tahun, dari total pengeluaran rutin Rp 3,4 triliun per tahun untuk membayar uang bau di Bantargebang dan biaya pengangkutan sampah,” kata Ali.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan akan ada fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik. Hanya saja, Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih fokus membangun fasilitas *refuse derived fuel* (RDF) sebagai sarana pengolahan sampah Jakarta. “RDF paling cocok untuk mengolah

sampah di Jakarta karena biayanya paling murah,” ujarnya.

Ia menuturkan, pengolahan sampah di DKI Jakarta sudah mencakup di segala lini. Begitu pula dari hulu yang terus digencarkan. “Pemerintah DKI tengah gencar membangun tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* di beberapa tempat. Di tempat ini juga terdapat mesin pemilahan dan pencacahan sehingga semua sampah bisa terkelola,” ujarnya.

Terkait retribusi sampah yang akan dimulai pada Januari 2025, Asep menuturkan, retribusi pelayanan kebersihan merupakan salah satu langkah Pemprov DKI untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien. “Penerapan tarif retribusi pelayanan sampah rumah tangga berpotensi menambah PAD Jakarta Rp 40.127.395.846. Kami akan pastikan program ini berjalan dengan baik,” katanya.

(TIK)